

## Representasi Perlawanan Kaum Miskin Jakarta Representation of the Resistance of the Poor People Jakarta

<sup>1</sup>Regi Fery Pratama, <sup>2</sup>Ratri Rizki

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung,*

*Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup>regiferyp@gmail.com, <sup>2</sup>ratri.rizki@gmail.com*

**Abstract.** Film is a communication message that uses channels in connecting communicator and communicant, and can cause certain effect for the audience. Film can also express meaning through signs. "Jakarta Unfair" is a film that raises the resistances of Jakarta residences to the evictions carried out by the government. The film also raises the issue of citizen life before and after relocation which is still rarely revealed by the mainstream media. The purpose of this research is how media represents the meaning of resistance in the documentary film "Jakarta Unfair". This research uses semiotic method, which is a science that examines signs. The theory used is John Fiske's television codes. In this research, researcher examined three levels that is reality level, representation level, and ideology level. The result of this research concludes that the reality of Jakarta citizens in "Jakarta Unfair" film is shown through the actions of citizens to resist the eviction by the government. The resistances ways that used by the citizens are different, such as marching, filing a law and refused to be relocated because the relocation did not guarantee their lives to be better.

**Keywords:** Film, Jakarta Unfair, Semiotic, John Fiske Television Codes.

**Abstrak.** Film merupakan pesan komunikasi massa yang menggunakan saluran (media) dalam menghubungkan komunikator dan komunikan, serta dapat menimbulkan efek tertentu bagi khalayaknya. Film juga dapat mengungkapkan makna melalui tanda-tanda. Film "Jakarta Unfair" merupakan sebuah film yang mengangkat tentang perlawanan warga Jakarta terhadap penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah. Film ini juga mengangkat persoalan kehidupan warga sebelum direlokasi dan setelah direlokasi yang mana masih jarang diungkap oleh media *mainstream*. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana media merepresentasikan makna perlawanan pada film dokumenter "Jakarta Unfair". Penelitian ini menggunakan metode semiotika, yaitu suatu ilmu yang mengkaji tentang tanda-tanda. Teori yang digunakan adalah kode-kode televisi John Fiske. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti tiga level yaitu level realitas, level representasi dan level ideologi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa realitas perlawanan warga Jakarta di film Jakarta Unfair ditunjukkan melalui aksi-aksi yang dilakukan warga untuk menolak terjadinya penggusuran oleh pemerintah. Cara perlawanan yang dilakukan oleh setiap daerah berbeda-beda, seperti berdemo, melakukan pengajuan hukum dan menolak untuk direlokasi karena relokasi pun tidak menjamin kehidupan mereka menjadi lebih baik.

**Kata kunci,** Film, Jakarta Unfair, Semiotika, Kode-kode Televisi John Fiske.

### A. Pendahuluan

Jakarta menjadi pusat pemerintahan dan pusat perekonomian negara Indonesia. Sudah tidak heran jika kota ini selalu dipenuhi orang-orang yang datang untuk mengadu nasib. Kepadatan penduduk di Jakarta saat ini semakin meningkat, kepadatan tersebut bisa saja menimbulkan permasalahan yang cukup serius di Ibu Kota Jakarta. Menurut data statistik BAPPEDA DKI Jakarta, dari tahun 2000, 2010-2014 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Apalagi penduduk yang berpindah dari kota asal mereka kemudian tinggal di Jakarta karena ingin mencari kehidupan yang layak, semakin padatnya orang yang ingin tinggal dan mencari pekerjaan, berarti semakin banyak pula saingan yang menjadi rival untuk mencari suatu pekerjaan.

Pembangunan yang semakin berkembang di Jakarta membuat beberapa daerah terancam keberadaan tempat tinggalnya, penggusuran yang dilakukan pemerintah dianggap semena-mena oleh sebagian masyarakat. Tak heran, jika banyak masyarakat yang dengan tegas menolak daerahnya digusur, karena pada dasarnya tidak semua warga pinggiran itu bisa disebut ilegal. Perlawanan yang ditunjukkan oleh masyarakat Jakarta berbeda-beda, Setiap daerah yang akan digusur mempunyai cara tersendiri untuk

menunjukkan perlawanannya. Salah satu contoh seperti apa yang ada di film “Jakarta Unfair”, warga Kampung Pulo melakukan perlawanan dengan cara menghadang para Polisi dan Satpol PP sehingga terjadi bentrok dengan warga yang menolak untuk direlokasi.

Di balik relokasi warga ke rumah susun, tidak sedikit warga yang tegas menolak untuk dipindahkan, karena berbagai macam faktor salah satunya sulit mencari mata pencaharian yang baru, tidak sesuai janji yang diberikan kepada warga perihal pembayaran uang sewa rumah susun yang makin memberatkan perekonomian. Berbeda dengan tempat tinggalnya yang terdahulu, walaupun lingkungannya tidak layak huni tetapi mereka mempunyai perekonomian yang lebih baik daripada mereka tinggal di rumah susun. Selain itu, di tempat terdahulu banyak pekerjaan serabutan yang bisa dikerjakan untuk menambah penghasilan sehari-hari.

Hubungan antara film dan masyarakat selalu dipahami secara linear. Artinya, film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan pesan (*message*) di baliknya, tanpa pernah berlaku sebaliknya. Kritik yang muncul terhadap perspektif ini didasarkan atas argumen bahwa film adalah potret dari masyarakat di mana film itu dibuat. Film selalu merekam realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan kemudian memproyeksikannya ke atas layar (Irawanto, 1999 : 13).

Film merupakan fenomena sosial, yang terdiri dari cerita dan gambar yang diiringi kata-kata dan musik. Kehadiran film di tengah kehidupan manusia ini semakin penting dan setara dengan media lain, keberadaannya praktis. Hampir dapat disamakan dengan kebutuhan akan sandang dan pangan. Dapat dikatakan hampir tidak ada kehidupan sehari-hari manusia berbudaya maju yang tidak tersentuh dengan media satu ini.

Dalam film Jakarta Unfair, memperlihatkan sisi lain dari kehidupan warga pinggiran Jakarta terutama dalam masalah penggusuran. Tentu di dalamnya terdapat realitas perlawanan yang ditunjukkan warga kepada pemerintah. Untuk itulah peneliti menggunakan penelitian metode kualitatif dengan pendekatan Semiotika John Fiske (*Television Codes*) agar dapat melihat makna dan tanda apa saja yang menunjukkan perlawanan pada film Jakarta Unfair.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana representasi perlawanan kaum miskin Jakarta dalam Film “Jakarta Unfair”?” Selanjutnya, tujuan penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui realitas perlawanan kaum miskin Jakarta dalam film “Jakarta Unfair”.
2. Untuk mengetahui kelas sosial direpresentasikan dalam film “Jakarta Unfair”.

## **B. Landasan Teori**

Setiap orang pasti berkomunikasi, itu terjadi karena mereka adalah makhluk sosial. Menurut istilah, komunikasi berpangkal pada perkataan Latin *Communis* yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari akar kata dalam bahasa Latin *Communico* yang artinya membagi (Cherry dalam Stuart, 1983, dalam Hafied 1998:20).

Film merupakan salah satu bentuk komunikasi, secara lebih khusus ia masuk ke dalam jenis komunikasi massa. Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak dan elektronik) (Nurudin 2007:4). Sebab, awal perkembangannya saja, komunikasi massa berasal dari pengembangan kata *media of mass communication* (media komunikasi massa).

Bahkan dewasa ini, film merupakan bentuk dominan dari komunikasi massa

visual di belahan dunia ini. Lebih dari ratusan jura orang menonton film di bioskop, film televisi dan film video laser setiap minggunya. Di Amerika Serikat dan Kanada lebih dari satu juta tiket film terjual setiap tahunnya (Agee, *et. al.*, 2001:364 dalam Elvinaro 2007:143).

Salah satu jenis film adalah film dokumenter, dan Jakarta Unfair masuk di dalam jenis film tersebut. Film dokumenter (*documentary film*) didefinisikan oleh Robert Flaherty sebagai “karya ciptaan mengenai kenyataan” (*creative treatment of actuality*) (Elvinaro 2007:148). Berbeda dengan film berita yang merupakan rekaman kenyataan, maka film dokumenter merupakan hasil interpretasi pribadi (pembuatnya) mengenai kenyataan tersebut.

Film dokumenter merupakan film nonfiksi yang menggambarkan situasi kehidupan nyata dengan setiap individu menggambarkan perasaannya dan pengalamannya dalam situasi yang apa adanya, tanpa persiapan, langsung pada kamera atau pewawancara. Dokumenter seringkali diambil tanpa skrip dan jarang sekali ditampilkan di gedung bioskop yang menampilkan film-film fitur. Akan tetapi, film jenis ini sering tampil di televisi. Dokumenter dapat diambil pada lokasi pengambilan apa adanya, atau disusun secara sederhana dari bahan-bahan yang sudah diarsipkan (Danesi, 2010 : 134).

Semiotik adalah cabang ilmu yang berurusan dengan pengkajian tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda, seperti sistem tanda dan proses yang berlaku bagi tanda (Van Zoest, 1993 : 1). Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu tanda (*sign*).

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam hasil penelitian ini akan dibagi ke dalam dua bagian yakni realitas perlawanan di film Jakarta Unfair dan kelas sosial di film Jakarta Unfair. Hasil penelitian ini merupakan temuan penelitian yang ada dalam film Jakarta Unfair:

#### Realitas Perlawanan dalam film Jakarta Unfair

Tinggal dan hidup di suatu tempat dengan aman, damai dan bermartabat merupakan dambaan setiap orang. Di dalamnya terdapat hak-hak yang harus terpenuhi, yakni hak ekonomi, sosial dan budaya. Hal tersebut dikarenakan didalam hak tersebut juga menyangkut hak-hak lainnya, seperti hak untuk hidup, hak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia dan sejahtera, hak atas lingkungan hidup yang baik, hak atas identitas yang berkaitan dengan hak atas pelayanan kesehatan dan juga hak atas jaminan sosial serta hak-hak untuk tempat tinggal. Daerah yang terkena penggusuran paksa terdapat beberapa yang mewakili yakni kampung pulo, Bukit Duri, Kampung Aquarium, dan Pasar Ikan.

Perlawanan yang dilakukan setiap daerahnya berbeda-beda. Kampung Pulo melakukan perlawanan dengan cara berdemo turun ke jalan untuk mengaspirasikan keinginan mereka agar tidak tergusur oleh pemerintah, sehingga menyebabkan terjadinya bentrok antar warga dan para aparat. Realitas yang ada pada film “Jakarta Unfair” terhadap warga Kampung Pulo tidak ditunjukkan bahwa warga melakukan pengajuan hukum, dalam film ini menunjukkan warga yang menolak penggusuran dan mengakibatkan terjadinya bentrokan dengan aparat kepolisian. Pada film ini warga melakukan perlawanan dengan berteriak melempar batu dan langsung dibalas rentetan gas air mata dari aparat. Sebagian warga tercerai berai mencari perlindungan sementara yang lain tetap melakukan perlawanan. Bentrokan ini terjadi setelah negosiasi warga dan Polres Jatinegara serta Pemkot Jakarta Timur menemui jalan buntu. Warga menolak penggusuran dan minta ganti rugi.

Berbeda dengan perlawanan yang dilakukan para warga Bukit Duri praktis minim perlawanan dari warga. Warga sebelumnya sudah mengetahui akan adanya penggusuran, namun warga tidak berhenti di situ saja, warga mengajukan hukum kepada pengadilan setempat. Di film ini diceritakan bahwa setelah mengetahui bahwa akan segera di gusur, masyarakat melakukan aksi musyawarah atau kongres yang dipimpin oleh Sandyawan Sumardi yakni salah satu tokoh yang berkomitmen penuh membela warga Bukit Duri sejak awal. Dia punya organisasi kemanusiaan bernama *Ciliwung Merdeka*. Kongres yang berisikan motivasi-motivasi kepada warga ini cukup membuat warga antusias untuk mendengarkan, ditambah lagi Sandyawan mengatakan, dalam pertemuan warga, warga bertekad untuk melawan. Ia pun merencanakan perlawanan. Warga akan tetap melawan meskipun berbeda dengan perlawanan warga Kampung Pulo. Mungkin kami melawan dengan lebih berkebudayaan. Sebab, jumlah warga Bukit Duri lebih sedikit ketimbang warga Kampung Pulo.

Setelah melakukan kongres, warga pun melakukan pengusulan inti dari permasalahan yang ada yakni warga dan komunitas ciliwung mengajukan konsep “Kampung Susun Manusiawi”. Konsep ini mencoba menyeleraskan bentuk hunian warga dengan lingkungan sosial-ekologisnya. Kampung Susun mengadopsi pola kehidupan kampung tradisional, yang dibangun secara partisipatif, yang sarat dengan ikhtiar pelestarian alam, lingkungan hidup sehat, wirausaha sosial-ekonomi, ruang-ruang sosial, sistem komunikasi terbuka, tersedia ruang-ruang seni-budaya dan religiusitas warga. Namun setelah mengusulkan konsep tersebut kepada pemerintah yang baru yakni Ahok-Djarot, pemerintah malah tetap ingin menggusur kampung Bukit Duri. Perlawanan yang terjadi di Bukit Duri terjadi diakhir, saat gugatan dinyatakan menang oleh warga Bukit Duri, sebelum sesaat digusur warga hanya pasrah dan sedih melihat rumah-rumah mereka digusur, pada saat digusur proses gugatan warga di pengadilan masih berlangsung, namun pemerintah sudah melakukan penggusuran secara paksa tanpa adanya bukti hukum yang jelas. Hingga pada akhirnya warga menuntut ganti rugi kepada pemerintah karena tempat tinggalnya sudah terlanjur digusur.

Perlawanan yang dirasakan oleh kampung pulo pun dirasakan oleh warga kampung akuarium, sesaat sebelum di gusur, warga berbondong-bondong melakukan aksi demo turun ke jalan. Kampung Akuarium yang berlokasi di Jakarta Utara dan dekat dengan bibir Pantai Utara Jakarta, menjadi alasan kawasan tersebut digusur adalah karena sertifikat tanah menunjukkan bahwa itu merupakan tanah milik pemerintah. Bentrokan antara aparat dengan warga pecah. Setelah negosiasi antar perwakilan warga tak menemui kata sepakat dengan Camat dan Kapolsek Penjaringan. Warga menuntut ganti rugi, sedangkan aparat tak mau kompromi untuk menunda tugas mereka, ekskavator pun dikerahkan ke hadapan warga yang duduk dan enggan beranjak dari lokasi. Bentrokan pecah. Ada empat orang warga dipukuli oleh Satpol PP, mereka adalah remaja pria dan lelaki dewasa. Usai bentrok, warga mengemasi barangnya, sebab ekskavator merobohkan salah satu rumah yang berisi warga di dalamnya. Warga kampung Aquarium, Penjaringan, Jakarta Utara mulai merasakan keresahan dengan proyek reklamasi teluk Jakarta yang akan diambil alih oleh pemerintah pusat.

Pasca penggusuran yang terjadi membawa dampak buruk bagi para warga di kawasan Pasar Ikan, selain kehilangan tempat tinggalnya, mereka juga kehilangan mata pencaharian, lingkungan serta sanak saudara. Kepentingan pemerintah yang menjadikan kawasan tersebut sebagai sentral bisnis tidak sejalan dengan kepentingan warga setempat. Daerah yang sudah ditinggalinya bertahun-tahun tentunya tidak akan bisa ditinggalkan begitu saja, terlebih sebagian besar hidupnya sudah digantungkan di

kawasan tersebut. Berbagai bentuk perlawanan tanpa kekerasan dibangun masyarakat yang terkena gusuran dalam upaya mendapatkan kembali tanah mereka dengan melakukan kongres melalui mekanisme musyawarah bersama warga, di mana terdapat orang dewasa, remaja, bahkan anak kecil untuk diikutsertakan, meskipun demikian pola ini tidak juga mendapatkan respon dari pemerintah, kondisi inilah yang kemudian memunculkan kekecewaan dan bentuk perlawanan yang lebih keras.

John Fiske menerangkan bahwa kode-kode yang muncul atau yang digunakan dalam acara televisi tersebut saling berhubungan sehingga terbentuk sebuah makna. Menurut teori ini pula, sebuah realitas tidak muncul begitu saja melalui kode-kode yang timbul, namun juga diolah melalui penginderaan seras referensi yang telah dimiliki oleh pemirsas televisi, sehingga sebuah kode akan dipersepsi secara berbeda oleh orang yang berbeda juga. Representasi realitas perlawanan tergambar dalam *scene-scene* yang dieksplorasi oleh peneliti. Kode-kode tersebut yakni level realitas, level representasi dan level ideologi.

Setelah ditinjau dari Level Realitas, perlawanan kaum miskin Jakarta ditunjukkan melalui beberapa kode-kode sosial. Salah satunya Kode *Appearance* (penampilan), pada gambar 4.1 warga Kampung Bukit Duri terlihat menggunakan pakaian yang sederhana, hal itu menandakan bahwa mereka adalah masyarakat yang tergolong kelas menengah kebawah. Tidak ada kesan mewah dari pakaian yang mereka gunakan. Hal ini menunjukkan bahwasannya perjuangan yang mereka lakukan bukanlah hal yang mudah untuk melawan kaum *elite* yang ingin menggusur tempat mereka.

Pada level representasi dalam film Jakarta Unfair, perlawanan kaum miskin Jakarta salah satunya ditunjukkan dengan kode *Camera* (kamera). Pada gambar 4.2 gambar pertama juru kamera menggunakan metode *long shoot* untuk menunjukkan objek dengan latar belakangnya melebihi pengambilan gambar *Full Shoot*. Di sini terlihat para warga yang menghadang aparat kepolisian berada ditengah jalan dengan latar belakang ruko-ruko dan bangunan tempat tinggal warga. Sedangkan pada gambar yang kedua juru kamera menggunakan metode pengambilan gambar *Full Shoot* untuk memperlihatkan objek dengan lingkungannya. Terlihat tulisan-tulisan vandalisme yang menandakan perlawanan warga yang menolak untuk digusur dan terlihat juga rumah yang dibatasi oleh seng.

Pada level ideologi kode kelas (*class*), warga Bukit Duri masih menunjukkan kebersamaanya meskipun rumahnya telah digusur oleh pemerintah.

### **Kelas sosial dalam film Jakarta Unfair**

Dalam masyarakat metropolis seperti Jakarta, kelas sosial menghasilkan gaya hidup tertentu, tetapi dalam rentang yang sangat lebar. Sehingga melahirkan variasi gaya hidup dalam kelas sosial yang sama. Istilah kelas memang tidak selalu memiliki arti yang sama, walaupun pada hakekatnya mewujudkan sistem kedudukan yang pokok dalam masyarakat. Dinamika warga tergusur selepas beradaptasi di lingkungan baru dan harus tetap menyambung hidup, entah bagaimanapun caranya. Hal ini selaras dengan yang dikatakan Marx bahwa yang menjadi motor perkembangan masyarakat adalah ketegangan ekonomi, pertentangan kepentingan antara kelas-kelas bawah dan kelas-kelas atas untuk kekuasaan (Suseno, Franz Magnis, 1999: 150) di sini pemerintah ditempatkan sebagai kelas atas yang menguasai kebijakan-kebijakan untuk kelas bawah, sampai pada akhirnya kelas bawah tidak bisa mendapatkan haknya.

Sikap pemerintah seperti ini terlihat dalam salah satu *sequence* di *Jakarta Unfair*, di mana warga terpaksa banting setir profesi untuk tetap bisa menghidupi keluarganya. Pemerintah seakan cuci tangan selepas warga direlokasi, secara mentah-mentah diberikan akses rusun gratis sebagai tempat tinggal hanya selama tiga bulan, dan

tetap harus membayar di bulan berikutnya. Tanpa ada pelatihan khusus untuk membuat masyarakat berdaya secara ekonomi, secara tidak sadar membuat para warga harus bercocok tanam demi tunggakan-tunggakan hutang sewa rusun yang mengantri di bulan-bulan selanjutnya. mungkin relokasi ke tempat-tempat di pinggiran laut, dipindah dari kampung asal ke tempat baru sejauh kurang lebih 25 km, membuat warga pada akhirnya pulang-pergi ke kampung asalnya karena di tempat baru tidak ada pekerjaan yang menghasilkan seperti di tempat asalnya.

Dalam film tersebut digambarkan bahwa pemerintah melakukan penggusuran di wilayah Kampung Akuarium dan pasar ikan untuk dijadikan sebagai kawasan komersial, sentral bisnis, perkantoran, hotel, sekolah, dan rumah sakit. Hal tersebut tentunya berdampak kepada mata pencaharian warga yang sehari-harinya mencari nafkah dikawasan reklamasi tersebut. Meskipun banyak ditentang oleh warga setempat dengan berbagai perlawanan, tetapi warga tidak bisa berbuat lebih karena pada dasarnya pemerintah yang mempunyai kuasa dan proses pembangunan pun terus dilanjutkan.

Peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi berperan juga dalam hal merencanakan, membimbing dan mengarahkan terhadap jalannya roda perekonomian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sebagai badan yang menjalankan wewenang untuk mengatur kehidupan ekonomi sosial, dan politik disuatu wilayah, pemerintah mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Namun sering kali kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah semata-mata lebih berpihak kepada para pemegang bisnis bukan untuk kepentingan umum dan rakyat kecil. Pada film ini ketimpangan kelas sosial yang terjadi memperlihatkan bahwa kurangnya perhatian pemerintah serta kurang mementingkan masyarakat kelas bawah.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian melalui pendekatan semiotika John Fiske dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Realitas perlawanan yang terjadi pada film “Jakarta Unfair” ini menunjukkan bahwa kurangnya keadilan bagi masyarakat kecil, penggusuran seakan menjadi hal yang sudah biasa bagi pemerintah, masih adanya ketimpangan dan ketidakadilan di kalangan masyarakat, terutama masyarakat kecil yang selama ini dianggap sebagai sampah yang terus menjadi permasalahan serius bagi pemerintah. Tidak adanya wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan tidak adanya sosialisasi sebelum penggusuran terhadap masyarakat menjadi pemicu terjadinya gesekan antara pemerintah dan masyarakat. Bukan hanya itu, janji pemerintah yang akan merelokasi korban penggusuran ke rusun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan menjadi titik awal perlawanan masyarakat. Janji pemerintah mengungkapkan bahwa hidup lebih layak setelah direlokasi ke rusun-rusun, sampai saat ini belum terbukti kebenarannya, justru faktanya warga semakin menurun kehidupannya di rusun dibandingkan pada saat mereka tinggal di tempatnya terdahulu.
2. Pada lingkungan masyarakat kita melihat bahwa ada perbedaan-perbedaan yang berlaku dan diterima secara luas oleh masyarakat, seperti halnya jabatan, kedudukan, dan lainnya. Dalam masyarakat metropolis seperti Jakarta, kelas sosial menghasilkan gaya hidup tertentu, istilah kelas memang tidak selalu memiliki arti yang sama, walaupun pada hakekatnya mewujudkan sistem kedudukan yang pokok dalam masyarakat. Kedudukan menentukan kelas sosial yang masyarakat pilih, banyak dari masyarakat Jakarta menggantungkan kehidupannya pada pekerjaan, semakin pekerjaan tinggi kebutuhan pun semakin banyak, kelas atas dan kelas bawah sebenarnya saling berkaitan satu sama lain,

teapi yang membedakan adalah cara hidup masing-masing kelas. Dalam film Jakarta Unfair, kelas bawah seakan selalu menjadi masalah bagi pemerintah. Kepentingan kelas elite menjadi yang utama bagi pemerintah, padahal seharusnya pemerintah bisa bersikap adil dalam memerlakukan kelas bawah, salahsatu contoh terdapat pada film tersebut yang menggambarkan bahwa pemerintah melakukan penggusuran di wilayah pasar ikan untuk dijadikan sebagai kawasan komersial, sentral bisnis, perkantoran. Hal tersebut tentunya berdampak kepada perekonomian dan mata pencaharian warga yang sehari-harinya mencari nafkah di kawasan reklamasi tersebut. Meskipun banyak ditentang oleh warga setempat dengan berbagai perlawanan, tetapi warga tidak bisa berbuat lebih karena pada dasarnya pemerintah yang mempunyai kuasa. Pada realitanya reklamasi yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk kebutuhan kelas elit bukan untuk kebutuhan kelas bawah. Hal ini menunjukan pemerintah memerlakukan kelas bawah dengan cara kapitalisme, pemerintah menggusur dengan tanpa bersosialisasi terlebih dahulu terhadap warga yang berada di daerah penggusuran tersebut.

#### Daftar Pustaka

- Ardianto, Elvinaro. 2007. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Cangara, Hafied. 1998. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Danesi, Marcel. 2010. *Pengantar Memahami Semiotika Media*. Yogyakarta : Jalasutra
- Irawanto, Budi. 1999. *Film, ideology, dan Militer ; Hegemoni Militer dalam Sinema Indonesia*. Yogyakarta : Media Pressindo
- Nawiroh, Vera. 2014. *Semiotika dalam Riset Komunikasi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Nurudin. 2007. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Suseno, Franz Magnis.2005. *Pemikiran Karl Marx*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Van Zoest, Aart. 1993. *Semiotika Tentang Tanda, Cara Kerjanya Dan Apa Yang Kita Lakukan Dengannya*. Penerjemah Ani Soekawati. Jakarta : Yayasan Sumber Ageung.